

**PERGESERAN KEDUDUKAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
BERDASARKAN UUD NRI 1945**

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh :

MUSLIH HAMIDI

NIM : R.100060019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

PERSETUJUAN

PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam
Sidang Ujian Tesis guna memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Magister Ilmu Hukum
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aidul Fitriadi A., SH., M.Hum.

Prof. Dr. Harun, SH, M.Hum.

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 6 Mei 2010

DEWAN PENGUJI

Tanda Tangan

Dr. Aidul Fitri Ciada Azhari, M.Hum

Ketua Penguji :

Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum

Anggota :

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Anggota :

Mengesahkan
Program Pasca Sarjana
Direktur,

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum.

NOTA PEMBIMBING

Dr. Aidul Fitriadi A., SH., M.Hum.
Prof. Dr. Harun, SH, M.Hum..
Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal : Tesis Saudara MUSLIH HAMIDI

Kepada Yth.

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis Saudara :

Nama : MUSLIH HAMIDI
NIM : R.100060019
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT
BERDASARKAN UUD NRI 1945

Dengan ini kami menilai Tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, April 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aidul Fitriadi A., SH., M.Hum.

Prof. Dr. H. Harun, SH, M.Hum.

ABSTRAK

MUSLIH HAMIDI . Pergeseran Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan UUD NRI 1945. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Mengetahui Konsep Lembaga MPR setelah di amandemen. 2) Untuk mengetahui Kedudukan MPR setelah di amandemen

Penelitian dalam tesis ini berjenis deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode Reduksi data, Sajian Data dan Verifikasi..

Hasil penelitian adalah: 1) Konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dihapus dengan Perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena susunan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas: anggota 2 lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan UUD 1945 telah memberikan perubahan besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena dasar yuridis untuk menjalankan kedaulatan rakyat telah dicabut oleh amandemen UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 3) Persamaan kewenangan Kongres di Amerika Serikat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah: Mengubah Undang-Undang Dasar dan Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam hal tugas Kesamaannya adalah tugas yang dilakukan setiap kali dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar., Sedangkan Dalam menjalankan tugasnya mempunyai perbedaan. Yaitu memegang kekuasaan legislatif ada ditangan kongres, sedangkan di Indonesia ada ditangan DPR

Kata kunci : pergeseran, kedudukan MPR

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUSLIH HAMIDI

NIM : R.100060019

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul PERGESERAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT BERDASARKAN UUD NRI 1945 adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut

Surakarta, April 2010

Yang membuat pernyataan

MUSLIH HAMIDI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Al Baqarah : 45)

“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak mau merubah sendiri”.

(Q.S. Arra'd : 11)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada :

orang tuaku yang dengan tulus selalu mendo'akan keberhasilan penulis

Istriku dan anakku yang senantiasa memberikan motivasi

Rekan-rekanku yang telah memberiku semangat

Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya tesis ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin untuk dapat menyusun thesis ini dengan baik karena keterbatasan penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Harun, SH, M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi akses pemanfaatan sarana prasarana.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan arahan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Aidul Fitriadi A., SH., M.Hum., Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan yang sangat berharga hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Harun, SH, M.Hum., Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan yang sangat berharga hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Bapak dan ibu dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
7. Bapak dan ibu dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak tersebut mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan tesis ini. Namun demikian penulis selalu membuka kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan thesis ini. Semoga thesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Nota Pembimbing	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Nota Pengesahan Ujian	vii
Pernyataan Keaslian Tesis	viii
Halaman Motto dan Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15

Bab II	Konsep Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat	18
	A. Konsep Lembaga Perwakilan Pada Waktu Negara Berdiri	18
	B. Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat Setelah Negara Berdiri...	21
	C. Konsep Lembaga Perwakilan di Negara modern	22
	D. Konsep Lembaga Perwakilan Setelah adanya Kontrak Sosial....	28
	E. Konsep Lembaga Perwakilan Rakyat di Negara Modern	29
	F. Konsep Lembaga Perwakilan di Indonesia.....	33
Bab III	Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan	41
	A. MPR Sebelum Perubahan UUD 1945	41
	1. UUD 1945	46
	2. Konstitusi RIS	47
	3. UUDS 1950	48
	4. Kembali ke UUD 1945	49
	B. MPR Sesudah perubahan UUD 1945	50
	1. Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945 ..	53
	2. Tugas dan Wewenang MPR Sesudah Perubahan UUD 1945...	59
	3. Pengaruh Perubahan MPR dalam struktur Ketatanegaraan	66
	C. Kedudukan MPR dibandingkan dengan Lembaga di negara lain..	70
	D. Eksistensi MPR kedepan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	76
BAB V	Simpulan dan Saran	80
	A. Simpulan	80
	B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85